



Judul : Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Najib : "Diplomasi itu Bukan Dagang

Tanggal : Senin, 17 September 2012

Surat Kabar : Pelita

Halaman : 20

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Najib: "Diplomasi Itu Bukan Dagang"

Apa makna diplomasi parlemen?

Diplomasi dulu kan hanya dipegang Kementerian Luar Negeri, dalam arti hanya eksekutif yang berperan dalam diplomasi dengan negara lain. Sekarang di era demokrasi, parlemen juga ikut terlibat dalam diplomasi.

Paling tidak, ada tiga tugas dalam diplomasi parlemen. Yakni membuat undang-undang. Bagaimana undang-undang satu negara dengan negara lain saling membantu, memudahkan, dan menguntungkan. Kedua, anggaran, yakni dukungan anggaran program mana yang didahulukan. Ketiga, kalau ada masalah dengan eksekutif, maka parlemen bisa meminta parlemen di sana untuk ikut terlibat menengahi bahkan mencari solusi.

Ada yang mengatakan diplomasi parlemen tak efektif dan hanya menghamburkan uang negara untuk perjalanan ke luar negeri?

Justru sangat efektif. Diplomasi itu beda dengan dagang. Jadi tidak bisa kami melakukan diplomasi, terus hasilnya langsung ada seketika itu juga. Diplomasi itu jangka panjang. Baru beberapa tahun bisa kita petik. Diplomasi itu kita yang menanam, pengusaha yang petik. Jadi kalau investasi itu meningkat, itulah hasilnya. Diplomasi itu tidak *direct* hasilnya, tapi nyata. Kalau hitung kuantitas, ya tidak tampak.

Bagaimana melakukan diplomasi parlemen dengan negara non-demokrasi yang parlemennya berada di bawah kekuasaan eksekutif?

Memang di kawasan ASEAN bervariasi. Tapi fungsinya sama besar. Misalnya, Singapura dan Malaysia, itu kurang demokratis, tapi mereka parlementer. Sehingga parlemen mereka justru lebih fungsional dalam membuat undang-undang. Sehingga diplomasi parlemen dengan negara yang tidak demokratis tetap penting.

Berapa anggaran yang dihabiskan untuk kegi-

atan diplomasi parlemen?

Saya tidak hapal. Yang mengerti itu Badan Anggaran.

Isu krusial apa saja yang akan dibahas dalam Pertemuan AIPA ke-33 di Lombok?

Utamanya, menyongsong ASEAN Community pada 2015. Di mana nanti ada pergerakan barang dan manusia yang semakin mudah di kawasan ASEAN. Kawasan ASEAN ini bisa menjadi semacam masyarakat Uni Eropa. Ini akan menjadi isu utama disamping persoalan lain, seperti KTT ASEAN di Kamboja yang sempat kisruh, kemudian sengketa Laut China Selatan, wilayah perbatasan, dan lainnya. Semua itu tidak bisa diabaikan. Tapi barangkali itu bukan yang utama. Yang utama adalah membangun kebersamaan, sehingga menguntungkan ekonomi bersama. Bagaimana menciptakan kawasan yang damai. Bagaimana perekonomian di ASEAN meningkat. Karena kawasan ASEAN dilirik oleh banyak pihak, bahkan disebut penyembuh penyakit ekonomi Amerika dan Eropa.

Soal solusi bagi krisis Laut China Selatan?

Kami ingin menyelesaikannya secara damai. Jangan sampai mengganggu hubungan ekonomi, dan persahabatan. Karena kita tahu, ASEAN dengan China punya hubungan ekonomi.

Pembentukan Komunitas ASEAN, seperti apa?

Intinya kami ingin semua menyatu, tapi tidak satu. Keragaman tetap diberi tempat. Misalnya, budaya itu masih diberi tempat. Mata uang juga tetap, tidak semua negara Asean harus satu mata uangnya. Tapi bagaimana misalnya transaksi rupiah juga bisa berlaku di Thailand begitu juga sebaliknya.

Kalau pembentukan parlemen ASEAN?

Tidak sampai ke arah situ. Kami tidak meniru Uni Eropa yang sampai membentuk parlemen Uni Eropa. [eboy]